

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Muhammad Alfatih Akbar P.

e-mail : alfatihakbarp@gmail.com

Abstrak

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi atau masyarakat lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu : akses, peran, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Perencanaan dan Penganggaran tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan¹. Namun meski demikian, pelaksanaan PPRG di daerah belum begitu optimal, begitu pula pelaksanaan dan eksekusinya di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan eksekusi dan pelaksanaan PPRG yang kurang optimal ini, diduga karena SKPD atau Badan pelaksana otonomi daerah di Pemda Temanggung juga masih tidak mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan PPRG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2016. Yang mana, penulis akan meneliti dan mewawancarai beberapa informan di beberapa SKPD yang telah mampu melaksanakan PPRG. Dengan harapan bisa mendapat data yang komprehensif terkait dengan PPRG. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis di mana penelitian ini berusaha untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian, menyelidiki secara rinci aktivitas atau pekerjaan manusia, dalam hal ini adalah pekerjaan yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengurus PPRG.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan eksekusi PPRG yang dilaksanakan oleh SKPD atau Badan di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih belum optimal, karena dari hasil temuan penelitian dari 36 SKPD atau Badan hanya ada 6 SKPD atau Badan yang mampu melaksanakan PPRG yang diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih belum optimal dalam rangka pelaksanaan PPRG.

Saran yang dapat disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat menyusun kebijakan daerah, baik itu Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang dengan jelas mengatur PUG dan PPRG, sehingga semua SKPD atau Badan akan secara keseluruhan menyusun program dan kegiatan yang merespon gender, yang nantinya akan tersusun dalam PPRG dan ARG, sehingga pelaksanaan PPRG di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : PPRG, PUG, ARG, Pemerintah Daerah

¹ Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, KemenKeu, Kemendagri, dan Kemen PP dan PA.

ANALYSIS OF GENDER RESPONSIVE BUDGETS IN THE TEMANGGUNG DISTRICT REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR 2016 FISCAL YEAR

Muhammad Alfatih Akbar P.

e-mail : alfatihakbarp@gmail.com

Abstract

Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) is a planning made by all government agencies, professional organizations or other societies drawn up by considering four aspects: equal access, roles, benefits and controls between women and men. Planning and Budgeting needs to consider the aspirations, needs, and problems of women and men, both in the process of formulating and in the implementation of activities¹². Nevertheless, the implementation of PPRG in the regions has not been optimal, as well as the implementation and execution in the Regional Government of Temanggung Regency. With the less than optimal execution and implementation of PPRG, it is suspected that SKPD or the implementing agency of regional autonomy in the Temanggung Government is still not aware of whether it is a PPRG.

This study aims to find out how the implementation of gender responsive planning and budgeting in the Regional Government of Temanggung Regency in 2016. Which, the authors will examine and interview some informants in some SKPD who have been able to implement PPRG. In the hope of obtaining comprehensive data related to PPRG. The research method used is an analytical descriptive in which this research seeks to find the widest knowledge of the object of research, to investigate in detail the activities or work of man, in this case is the work done in the Regional Government of Temanggung Regency in the management of PPRG.

The results of this study indicate that the implementation and execution of PPRG implemented by SKPD or Agency in Local Government Temanggung Regency is still not optimal, because of the findings of research from 36 SKPD or Agency there are only 6 SKPD or Agency capable of implementing PPRG integrated with programs and activities implemented. Thus it can be concluded that the Regional Government of Temanggung Regency is still not optimal in the implementation of PPRG.

Suggestions that can be submitted to the Local Government of Temanggung Regency is that the Regional Government of Temanggung Regency can arrange the local policy, be it Regent or Local Regulation which clearly regulate PUG and PPRG, so that all SKPD or Agency will as a whole prepare programs and activities that respond gender, which will be arranged in PPRG and ARG, so that the implementation of PPRG in the Local Government of Temanggung Regency can run optimally.

Keywords : PPRG, PUG, ARG, Local Government

^{2 1} Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, KemenKeu, Kemendagri, dan Kemen PP dan PA.

Pendahuluan

Dalam masa seperti sekarang ini keadaan senantiasa menuntut adanya perubahan-perubahan besar yang berkaitan dengan relasi gender, yaitu hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang berdasarkan pada kualitas, *skill*, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang selalu berkembang (Umar : 2000), dengan kata lain dalam masa sekarang ini kesetaraan gender menjadi hal yang penting. Dengan adanya perwujudan kesetaraan gender ini diharapkan perempuan dan laki-laki dapat berkontribusi dalam rangka pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional secara adil. Karena dapat dikatakan bahwa dengan adanya isu gender yang lebih menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan menjadikan Pemerintah turun tangan dan giat dalam membangun kesetaraan gender, dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur tentang PUG, seperti halnya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang menginstruksikan kepada semua kementerian dan lembaga untuk melaksanakan PUG dengan beberapa program dan kegiatan. Melalui Inpres tersebut pemerintah sudah membuat langkah awal untuk perkembangan gender di Indonesia.

Pelaksanaan PUG juga diharapkan dapat terlaksana dalam semua kegiatan dan program baik itu dari perencanaan, perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasinya, dengan kata lain PUG diharapkan menjadi acuan agar program dan kegiatan dalam lembaga atau kementerian dapat dilaksanakan. Salah satu perwujudan PUG adalah dengan melaksanakan PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, di mana semua lembaga atau kementerian diinstruksikan agar mampu menyusun analisis gender dari data yang diperoleh, dan nantinya dari data tersebut dapat dilanjutkan dengan penyusunan ARG atau Anggaran Responsif Gender. ARG tersebut berisi tentang satu atau setidaknya dua program dengan sedikitnya dua kegiatan yang dilaksanakan dengan merespon isu gender yang ada dari urusan yang diampu oleh lembaga atau kementerian, hal serupa juga diinstruksikan kepada Pemerintah Daerah, tak terkecuali adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung. Namun dalam kenyataannya kegiatan dan pelaksanaan PPRG dengan bentuk ARG di Pemerintah Kabupaten Temanggung masih jauh dari kata optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2016, karena setelah ditelusuri hanya ada setidaknya 6 SKPD atau Badan yang baru melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program ARG, dari jumlah keseluruhan 36 SKPD atau Badan yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dengan kata lain PUG atau isu gender belum begitu diperhatikan di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, padahal pelaksanaan PUG sangat dibutuhkan karena dengan itu, pemerintah mampu bekerja secara lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan, program dan kegiatan yang adil serta responsif gender kepada rakyatnya. Maka dengan begitu, pelaksanaan PUG melalui ARG dan PPRG akan mengantarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung kepada pencapaian kesetaraan gender, dan mampu meningkatkan kehidupan sosio politik dan ekonomi rakyatnya ke arah yang lebih sejahtera.

Untuk mempermudah pembahasan permasalahan, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung?

Kerangka Teori

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Temanggung. Hal ini menjadi suatu komponen yang penting karena dalam PPRG/ARG ini Pemerintah Daerah menempatkan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan tujuan menciptakan kesetaraan gender dalam

masyarakat. Dengan adanya kesetaraan gender ini diharapkan masyarakat, baik perempuan dan laki-laki dapat berperan serta aktif dalam rangka pembangunan daerahnya yaitu Kabupaten Temanggung.

Kesetaraan Gender

Kata 'gender' dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berhubungan dengan peran sosial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan secara biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin biologisnya dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya dan kuasa (Puspitawati,2012). Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan dimana ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk yaitu marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja ganda (*double burden*) (Fakih,1999:150). Dapat dilihat bahwa ketidaksetaraan gender ini adalah lahir dari budaya dan konstruksi manusia dalam membentuk peran dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, maka dengan adanya ketidaksetaraan gender ini muncul istilah kesetaraan gender, yang berarti suatu situasi yang menghendaki bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mampu ikut serta dalam setiap proses perubahan sosial dan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender disebut juga dengan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain PUG adalah jalan untuk menjadikan gender sebagai acuan atau dasar dalam rangka penyusunan dan perencanaan program kegiatan baik dari perumusan, penganggaran hingga pelaksanaan dan pemantauannya, atau juga dapat disebut bahwa dengan perbedaan gender ini dapat mengantarkan pada pembangunan yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender merupakan strategi politik atau menjadi isu politik di mana pemerintah harus dengan gamblang menyampaikan misinya untuk memasukkan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program yang nantinya harus mengarah kepada kesetaraan gender (Nugroho,2008).

Perencanaan dan Penganggaran

Di dalam Haryanto, Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran; dan anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang terkait. Proses penyusunan APBD di tingkat Kabupaten merupakan hasil kerja sama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif tingkat Kabupaten. Tersusun dari tim anggaran yang diketuai Sekda, dan beranggotakan wakil-wakil dari badan, dinas dan unit kerja Pemerintah Kabupaten (Ashari,2004:33).

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

PPRG merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu; akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatannya. PPRG juga dapat disebut sebagai instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan

atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan gender.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, dimana penelitian ini berusaha untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian, menyelidiki secara rinci aktivitas atau pekerjaan manusia dan hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Dengan kata lain, penulis ingin meneliti aktivitas dan pekerjaan terkait dengan PPRG dan ARG di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Lokasi penelitian yang dipilih adalah bertempat di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, dengan melakukan wawancara ke beberapa SKPD atau Badan yang berkaitan dengan persoalan gender di Temanggung. Adapun jenis data dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif kali ini menggunakan data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol yang menggambarkan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial yang terkait dengan penerapan PPRG di Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder, yang didapat dengan cara wawancara kepada sumber pertama dan data yang ditemukan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen pemerintah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini didapat dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa SKPD / Badan dan menganalisis dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yaitu Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan dapat menggambarkan seberapa jauh penerapan dan pelaksanaan PPRG di tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Analisis Dokumen Alokasi Anggaran Responsif Gender di Tiap SKPD

Komposisi anggaran yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PUG atau mata anggaran yang secara eksplisit menyebutkan kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang ditunjukkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dengan disusunnya PPRG/ARG merupakan salah satu cara yang paling masuk akal dalam pelaksanaan PUG, dapat diketahui bahwa APBD yang mampu menyentuh isu gender dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dengan program dan kegiatan yang responsif gender. karena dengan program dan kegiatan yang responsif gender tersebut akan secara langsung menyentuh masyarakat, sehingga peningkatan IPM, IPG dan pengentasan kemiskinan dapat meningkat secara optimal.

Namun, yang didapat oleh penulis adalah PPRG masih belum dilaksanakan dengan baik di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, dengan hanya beberapa SKPD atau Badan yang melaksanakan PPRG. Perbandingan yang ditunjukkan adalah 8:38 yang mana 8 SKPD atau Badan telah mampu melaksanakan PPRG sedangkan 30 SKPD atau Badan yang lain masih belum mampu melaksanakan PPRG atau belum mampu mengintegrasikan program dan kegiatan yang merespon gender di dalam sistem anggaran mereka. Kemudian dari hal ini saja sudah dapat terlihat bahwa masih terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan gender yang jelas terjadi karena Pemerintah Daerah belum mampu mengoordinasikan semua jajaran pelaksana Otonomi Daerahnya atau SKPD dan Badannya untuk melaksanakan PPRG.

Meski dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian atau Lembaga sudah jelas bahwa ada kategorisasi untuk ARG, namun pelaksanaan dari *gender budgeting* di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih jauh dari kata optimal, karena sebagian besar SKPD atau Badan belum mampu mengintegrasikan ARG dalam program dan kegiatan yang mereka laksanakan. Hal ini adalah dikarenakan baik dari Pemda atau SKPD/Badan masih belum mengetahui secara menyeluruh apa saja hal-hal yang sebenarnya mampu dikategorikan

sebagai hal yang merespon isu gender. Selain itu, dalam tubuh Pemerintah Daerah baik itu dari eksekutif, legislatif dan yudikatif daerah belum memiliki komitmen yang kuat untuk pelaksanaan PPRG atau ARG ini.

Hal ini juga dapat terlihat dari komposisi anggaran di setiap SKPD atau Badan yang tidak mampu menyebutkan satu pun program kegiatan yang merespon isu gender meski ada beberapa SKPD atau Badan yang telah mampu melaksanakan PPRG, namun ketimpangan pengalokasian anggaran, yang mana sebagian besar SKPD atau Badan lebih berfokus pada pengadaan infrastruktur secara fisik, dan pemberian gaji kepada pegawainya masih banyak dan dapat dijumpai. Ini dapat dilihat dalam beberapa tabel yang diolah dari LRA APBD Kabupaten Temanggung tahun 2016 berikut :

Urusan Pendidikan

Dinas	ARG	%ARG	Total
Dinas Pendidikan	Rp.63.584.300	0,01%	Rp. 504.267.880.517

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Dinas yang telah mampu menerapkan ARG dengan melaksanakan program kegiatan yang merespon gender dengan anggaran sejumlah Rp.63.584.300,00 dengan dua mata anggaran yaitu : Pengarusutamaan Gender dengan Program Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.50.000.000,00 dan Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.584.300,00 perbandingan yang cukup jauh dapat dilihat bahwa total keseluruhan anggaran di Dinas Pendidikan adalah Rp.504.267.880.517,00. Meski ARG sudah terlaksana dalam Dinas Pendidikan namun, jumlah anggaran yang diterima untuk ARG ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggaran yang mencapai angka Rp.504.267.880.517.

Urusan Kesehatan

Dinas	ARG	%ARG	Total
DKK	Rp.1.364.188.795	1%	Rp.132.678.038.445

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung juga adalah Dinas yang telah mampu melaksanakan ARG didalam program dan kegiatannya, yang mana memang tugas dari DKK adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi daerah. Yang mana kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat Temanggung, baik perempuan dan laki-laki, dengan begitu DKK sudah mampu melaksanakan tugas dengan baik, dengan melakukan pelayanan yang adil bagi semua masyarakat Temanggung.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Kesehatan yang telah merespon gender adalah ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.1.364.188.795 dari keseluruhan anggaran yang mencapai Rp.132.678.038.445. Adapun program kegiatannya adalah mencakup ; Pelayanan Kebidanan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Pelayanan Ibu Hamil, Melahirkan, dan Anak, Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Meski sudah ada program dan kegiatan yang menyebutkan pelayanan bagi perempuan, namun disini belum disebutkan pelayanan yang khusus untuk laki-laki. Namun dengan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan diatas dapat dikatakan bahwa DKK telah mampu mengintegrasikan ARG dengan sistem anggaran yang mereka miliki dengan pelaksanaan program-program yang mampu merespon kebutuhan-kebutuhan gender bagi masyarakat.

Urusan Pekerjaan Umum

Dinas	ARG	%ARG	Total
DPU	-	0%	Rp.176.973.253.141

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

DPU merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang penataan runag, tata kota, energy dan sumber daya mineral termasuk pemadam kebakaran. Dari tabel yang ada diatas, dapat terlihat bahwa PUG belum menjadi isu yang penting dalam penganggaran di DPU, karena masih belum dapat kita temui anggaran yang merespon gender di dalam DPU.

Urusan Perencanaan Pembangunan

Dinas	ARG	%ARG	Total
Bappeda	Rp.51.320.000	0%	Rp.19.839.675.099

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Bappeda merupakan salah satu pelaksana otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam anggarannya, Bappeda memiliki satu mata anggaran yang merespon kebutuhan gender di Temanggung, yaitu dengan pelaksanaan Analisis Indeks Pembangunan Gender di Temanggung. Analisis IPG ini menghabiskan dana sebesar Rp.51.320.000 yang merupakan bagian dari anggaran keseluruhan yang mencapai Rp.19.839.675.099.

Urusan Perhubungan

Dinas	ARG	%ARG	Total
Dishubkominfo	-	0%	Rp.9.656.898.371

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan Dinas yang memiliki tugas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan sub bidang perhubungan darat, dan bidang komunikasi serta informatika. Dalam anggaran yang ditetapkan pada Dinas ini nampaknya masih belum mampu untuk mengintegrasikan PUG dengan baik. Karena dapat kita cermati bahwa pada Dinas Perhubungan ini masih belum ada program kegiatan yang merespon isu gender, dari anggaran keseluruhan yang telah ditetapkan tidak ada sepeserpun yang melaksanakan program kegiatan yang merespon gender.

Urusan Lingkungan Hidup

Dinas	ARG	%ARG	Total
BLH	-	0%	Rp.5.150.059.553

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Urusan lingkungan hidup yang kemudian dikelola oleh BLH, dalam sistem anggarannya masih belum memiliki program kegiatan yang merespon gender, sedangkan yang dapat kita temukan adalah

jumlah anggaran yang mencapai angka Rp.5.150.059.533 digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur secara fisik. Dengan begitu maka, dapat dilihat bahwa pelaksanaan PUG masih belum diperhatikan dalam BLH.

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas	ARG	%AR G	Total
Dindikcapil	Rp.279.111.500	3%	Rp.9.401.868.229

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dindikcapil, merupakan salah satu Dinas yang telah mampu melaksanakan PUG dengan mengintegrasikan program pencatatan KIA didalamnya, yang dapat dilihat bahwa penerbitan dan pembuatan KIA mendapat anggaran yang mencapai angka Rp.279.111.500, yang mana program ini juga merupakan amanah dari Permendagri nomor 2 tahun 2016. Setidaknya melalui Dindikcapil, sudah melaksanakan PUG dengan menerbitkan dan membuat KIA.

Urusan KB dan Kesejahteraan Sosial

Dinas	ARG	%AR G	Total
BKBPP P	Rp.4.822.429.245	41%	Rp.11.741.904.218

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

BKBPP merupakan dinas yang paling banyak menggelontorkan anggaran untuk kebutuhan gender di Kabupaten Temanggung, sebut saja dengan anggaran yang hampir 41% digunakan untuk keperluan dan pemenuhan kebutuhan gender. Hal tersebut terlihat begitu jelas dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh BKBPPP yang hampir semuanya adalah program dan kegiatan yang merespon gender.

Adapun program kegiatan yang dimaksudkan ialah sebagai berikut : Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan, Fasilitasi Advokasi Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak, Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fasilitasi PUG dan ARG, Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak, Fasilitasi P2TP2A, Penyelenggaraan Forum Anak, Fasilitasi WCC, Kelembagaan PUG, Anak dan GSIB, Pembinaan Organisasi Perempuan, Advokasi Pelaksanaan ARG di SKPD, Pelatihan Kepemimpinan dan PUG, dan masih banyak lagi. Dengan anggaran yang digunakan untuk ARG telah mencapai 41% dengan demikian dapat dikatakan bahwa BKBPPP telah mampu mengintegrasikan ARG dan PPRG dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan, karena selain memang BKBPPP adalah Badan yang berwenang dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Temanggung.

Urusan Sosial

Dinas	ARG	%AR G	Total
Dinso s	Rp.604.682.600	10%	Rp.6.145.572.928

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan Dinas pelaksana otonomi daerah yang mengelola urusan sosial. Dalam sistem anggarannya Dinas Sosial sudah mampu melaksanakan program dan kegiatan yang merespon kebutuhan gender di Kabupaten Temanggung dengan pelayanan yang diberikan kepada PMKS, dimana para penyandang kesejahteraan sosial ini adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan dan setidaknya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui tangan Dinsos ini lah para PMKS ini dapat ditangani dengan beberapa program dan kegiatan yang

tentunya sudah merespon kebutuhan gender. Karena kita tahu bahwa PMKS tidak bisa dibeda-bedakan apakah hanya untuk perempuan saja atau hanya untuk laki-laki saja.

Dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinsos maka PMKS yang ada di Temanggung menjadi telah terlayani dengan cukup baik, karena dengan adanya beberapa program kegiatan semacam ini : Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Penanganan Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan, dan Anak, Program Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Kerja bagi Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak Nakal, Pembinaan Anak Nakal, Anak Jalanan dan Anak Terlantar Luar Panti, Pelatihan Keterampilan Kerja dan bantuan Sosial bagi Anak Penghuni Panti Asuhan, Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma, Pembinaan Kesejahteraan Sosial lanjut Usia Terlantar, dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan uraian program kegiatan serta jumlah ARG yang hampir mencapai 10% menjadikan Dinsos Kabupaten Temanggung termasuk ke dalam SKPD atau Badan yang telah mampu melaksanakan ARG dengan optimal.

Urusan Ketenagakerjaan

Dinas	ARG	%ARG	Total
Disnakertrans	-	0%	Rp.9.016.804.192

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas dalam melaksanakan urusan tersebut. Pada tahun 2016 Disnakertrans mendapat alokasi anggaran mencapai Rp.9.016.804.192 yang dari keseluruhan anggaran tersebut tidak ada satu pun mata anggaran yang menyebutkan untuk urusan gender. Padahal sejatinya urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi ini sangat erat kaitannya dengan gender, apalagi tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri adalah didominasi oleh perempuan.

Urusan Penanaman Modal

Dinas	ARG	%ARG	Total
Ktr. PPM.	-	0%	Rp.2.615.379.140

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang membawahi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.615.379.140,00. Yang mana dengan jumlah itu, SKPD ini lebih berfokus pada anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.592.078.392,00 dan untuk belanja pegawai dengan alokasi sebesar Rp. 1.023.300.748,00. Dengan prioritas urusan yang memang jauh dari unsur gender tidak mengherankan jika dalam anggaran dinas ini tidak ditemukan mata anggaran yang responsif gender.

Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Dinas	ARG	%ARG	Total
Ktr. PPM.	-	0%	Rp.2.615.379.140

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dalam urusan kebudayaan, pemuda dan olah raga ditangani oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Jika dilihat dari alokasi anggarannya dinas ini mendapatkan dana yang bisa dikatakan lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran dinas dan SKPD yang lain. Anggaran yang diterima oleh Disbudparpora ini mencapai angka Rp. 20.808.031.547,00 yang digunakan untuk belanja langsung sebesar Rp. 17.998.600.055,00 dan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2.809.431.492,00. Namun pada praktiknya sama sekali tidak ada anggaran atau mata anggaran yang menyebutkan tentang gender dan yang merespon tentang kebutuhan gender.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dinas	ARG	%AR G	Total
Satpol PP.	-	0%	Rp.3.756.454.701
Kesbang l	-	0%	Rp.2.319.783.548

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di tingkat Kabupaten Temanggung ini dikelola oleh dua dinas yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung. Dilihat dari sisi anggarannya kedua instansi pemerintah ini jelas terpisah yang mana Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp. 3.756.454.701,00 dengan rincian Rp. 2.255.523.344,00 digunakan untuk belanja pegawai dan Rp. 1.500.931.357,00 digunakan untuk belanja langsung.

Kantor Kesatuan Bangsa mendapat alokasi sebesar Rp. 2.319.783.548,00 dengan rincian digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 1.049.784.043,00 dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.269.999.505,00. Dalam hasil temuan penulis, dalam sistem anggaran kedua dinas ini tidak ada mata anggaran yang menyebutkan tentang gender di kedua instansi pemerintahan ini. Ketiadaan mata anggaran yang sensitif gender di ke dua instansi ini tentunya menjadikan program Pengarusutamaan Gender tidak berjalan semestinya.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dinas	ARG	%AR G	Total
DPRD	-	0%	Rp.11.108.353.935

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dalam anggaran yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, instansi ini mendapat alokasi anggaran yang mencapai angka Rp. 11.108.353.935,00, dimana dengan jumlah nominal tersebut semuanya digunakan untuk belanja pegawai. Di mana satu mata anggaran ini sudah mampu menghabiskan semua alokasi anggaran yang diterima oleh DPRD itu sendiri, dengan kata lain anggaran yang diterima oleh DPRD semuanya digunakan untuk belanja pegawai. Bahkan jika kita lihat dari temuan peneliti maka tidak ada satu pun mata anggaran di DPRD yang dialokasikan untuk mata anggaran yang responsif gender.

Dinas	ARG	%AR G	Total
Bupati dan wakil	-	0%	Rp.763.676.118

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Hampir sama dengan alokasi anggaran yang diterima DPRD, alokasi anggaran yang diterima oleh lembaga eksekutif ini juga hanya berfokus pada alokasi anggaran untuk belanja pegawai dengan jumlah nominal yang sama dengan anggaran keseluruhan yang diterima. Dalam alokasi anggaran yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada tahun 2016, mencapai angka Rp. 763.676.118,00 yang mana dalam angka tersebut tidak ditemukan mata anggaran yang merespon isu gender.

Dinas	ARG	%ARG	Total
Sekda	Rp.14.937.300	0,2%	Rp.87.103.385.919

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dari alokasi anggaran secara keseluruhan yang berjumlah Rp. 87.103.385.919,00 yang diterima oleh Sekretaris Daerah digunakan untuk belanja pegawai sejumlah Rp. 11.030.009.774,00 dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 76.073.376.145,00, serta sejumlah Rp. 14.937.300,00 digunakan untuk menjalankan program yang berbasis gender. Program tersebut ialah program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program ini dijalankan dalam rangka pemberian fasilitas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas	ARG	%ARG	Total
Sek DPRD	-	0%	Rp.17.881.626.846

Sumber: diolah dari LR APBD 2016

Dapat kita lihat bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh sekretariat DPRD mencapai angka Rp. 17.881.626.846,00 yang digunakan untuk belanja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.627.027.716,00 dan belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 15.254.599.130,00. Angka tersebut merupakan angka yang sangat cukup untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah instansi pemerintahan.

Namun dari angka yang telah disebutkan di atas, tidak ada satu pun mata anggaran yang merespon akan isu gender, tentunya dapat kita tahu bahwa peranan dari Sekretariat DPRD ini juga penting dalam jalannya pemerintahan daerah. Tetapi, kenyataannya pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender di instansi terkait masih belum berjalan dengan baik.

Paparan tabel diatas merupakan paparan dari sebagian tabel yang ada di dalam skripsi yang ditulis oleh Penulis. Adapun dapat dilihat bahwasanya memang pelaksanaan PUG yang tercermin dari PPRG dan ARG masih belum menjadi fokus utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Temanggung. Meski demikian, sudah ada beberapa SKPD atau Badan yang telah mampu melaksanakan PPRG dengan baik.

Perspektif Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Temanggung

Perencanaan dan Penganggaran (Musrenbang) : Sebatas Kehadiran (Kuota)

Adanya PPRG ini tidak lain adalah untuk menciptakan iklim perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti akses, peran, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. PPRG ini juga memerlukan pertimbangan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan³. Kemudian nantinya dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dikontrol apakah kegiatan yang telah disusun dan direncanakan ini dalam pelaksanaannya sudah merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki atau belum, karena pada dasarnya

³ Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga (Jakarta: 2012).

Pemerintah Daerah melalui Dinas atau SKPD-nya diharuskan mampu memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakatnya baik perempuan maupun laki-laki.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan-Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, dan Musrenbang tingkat Kabupaten menjadi suatu alur atau instrumen penting dalam rangka penyusunan dan penganggaran ini, karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat akan disampaikan terlebih dahulu pada musyawarah perencanaan dan pembangunan di tingkat desa yang kemudian nantinya hasil dari musrenbang ini akan disampaikan pada tingkat Kecamatan dan akan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten. Musrenbang menjadi salah satu pintu yang memudahkan masyarakat untuk ikut serta membangun lingkungannya, yang dimulai dari lingkungan desa.

Jadi disini perlu adanya peran yang tak kalah penting dari pemerintah desa untuk menstimulasi agar masyarakat peka dan sensitif pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dimana pemerintah desa juga harus mampu menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang-Desa dan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat desa, terutama meningkatkan partisipasi dari kaum perempuan. Karena pada dasarnya perempuan di dalam masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, maka seharusnya dari pihak perempuan dan laki-laki juga harus mampu mendukung perempuan agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerahnya, yang diawali dengan pelaksanaan Musrenbang Desa.

Analisis Gender di Struktur Pemerintah Kabupaten Temanggung

Pembangunan gender di Temanggung secara riilnya dapat dilihat melalui angka yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). Namun, bagaimana tingkat/keadaan yang sebenarnya terjadi terkait dengan pembangunan gender di Temanggung dapat diambil dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, seperti halnya apakah masyarakat Temanggung telah merasakan manfaat dengan adanya berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, seperti apa pemahaman masyarakat tentang gender, seperti apa tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, dan seperti apa tingkat partisipasi perempuan dalam instansi pemerintahan, Apakah perempuan dapat bersaing dengan sehat dan adil dalam pengelolaan sumber daya dengan kaum laki-laki.

Dalam lembaga legislatif daerah, atau DPRD Kabupaten Temanggung, sudah mampu menempatkan perempuan sesuai dengan kebijakan afirmasi yang menyarankan agar 30% anggota DPRD adalah perempuan. Hal tersebut telah terlaksana dengan persentase 30,4% anggota DPRD adalah perempuan. Angka lain yang ternyata menunjukkan jumlah yang cukup mengejutkan adalah jumlah PNS perempuan dan PNS laki-laki di Pemda Temanggung adalah lebih banyak PNS perempuan dengan persentase 52,75% banding 47,25%⁴. Dengan angka yang menunjukkan jumlah seperti yang disebutkan, dapat dilihat bahwa pengelolaan sumber daya dalam pemerintah antara perempuan dan laki-laki sudah seimbang, bahkan lebih banyak perempuan di dalamnya.

Analisis Gender dalam Penganggaran dan Pemberian Layanan Publik

Adanya otonomi daerah merupakan sebuah kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa, "*otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" Jadi disini dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menerjemahkan hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan melakukan pelayanan dasar tanpa mengingkari NKRI.

Dengan adanya UU tentang Otonomi Daerah yang seperti disebutkan diatas, memberikan kelonggaran bagi Pemerintah Daerah Temanggung untuk mengurus dan mengelola urusan rumah

4 Sumber data diolah.

tangganya sendiri, hal ini dilakukan dengan pembagian tugas kepada semua jajaran SKPD dan Badan di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :

Urusan Pendidikan : Pembangunan untuk Semua

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemeritahan daerah dalam bidang pendidikan. Wajah pendidikan nasional semakin kesini, perkembangannya semakin menunjukkan kemandirian yang cukup signifikan, dengan tingginya partisipasi masyarakat daerah untuk ikut serta mengenyam pendidikan dasar adalah salah satu faktor penunjangnya. Pemberian layanan pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah terbuka untuk semua masyarakat Temanggung, baik perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam rangka mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar hingga menengah pertama.

Dalam Dinas Pendidikan pada tahun 2016 juga melaksanakan program dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan gender, program kegiatan ini adalah Program Pendidikan Kesetaraan dan Program Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam pendidikan. Meski pada tahun setelahnya program peran serta anak dan kesetaraan gender tidak lagi dilaksanakan, karena anggaran yang untuk melaksanakan program tersebut adalah bersumber dari Provinsi yang kini telah dicabut. Namun, meski demikian Dinas Pendidikan telah mampu melaksanakan ARG dengan optimal.

Urusan Sosial : Berfokus pada PMKS

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tentunya berkecimpung dalam kehidupan sosial yang nyata yang terjadi dan ada di dalam masyarakat Temanggung. Dengan artian bahwa, program dan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat adalah adil, tidak memandang apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Dengan begitu maka akan memengaruhi pembangunan gender yang ada di Kabupaten Temanggung, karena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Temanggung adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Dengan pelaksanaan program kegiatan yang berfokus pada PMKS, maka Dinas Sosial sudah mampu melaksanakan ARG dan PPRG dengan baik, mengingat bahwa PMKS terdiri dari perempuan dan laki-laki, meski nantinya kebutuhan antara PMKS laki-laki dan perempuan berbeda, bukan berarti pelayanan yang diberikan memihak salah satunya.

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Berfokus pada KIA

Pada tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung melaksanakan program yang berbasis gender, yaitu pembuatan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yang mana kegiatan ini mengacu pada amanat yang diberikan melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang memuat peraturan untuk pembuatan KIA tersebut. Dengan anggaran yang mencapai angka Rp. 279.111.500,00 tersebut digunakan untuk menjalankan kebijakan pembuatan KIA, yang mana KIA ini sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan melaksanakan program perlindungan anak. Karena dengan kepemilikan KIA menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 adalah bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Jadi dapat dikatakan bahwa KIA ini merupakan program dan terobosan baru yang cukup bermanfaat bagi proses pemenuhan hak-hak anak yang mencakup: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Selain berfokus pada KIA, Dincukapil juga melaksanakan tugas untuk pembuatan dan penerbitan KTP serta Akta, yang mana ke semua dokumen ini merupakan dokumen wajib bagi semua masyarakat, utamanya masyarakat Temanggung.

Urusan Kesehatan : Berfokus pada Reproduksi dan Kesehatan Anak

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang membawahi semua Puskesmas yang ada di tiap Kecamatan, bertanggung jawab atas tingkat kesehatan dan urusan kesehatan masyarakat Temanggung. Dalam program kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, semuanya merupakan program kerja yang merespon gender, karena dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak dibedakan atau didahulukan untuk laki-laki atau perempuan terlebih dahulu, karena memang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang teraplikasikan di Puskesmas adalah adil.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan oleh DKK adalah program kesehatan yang adil bagi laki-laki dan perempuan seperti halnya : Pelayanan kebidanan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil, Melahirkan, dan Anak, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. Dari berbagai program kegiatan yang telah terlaksana dapat dilihat bahwa DKK telah mampu melaksanakan tugas untuk menjamin kesehatan masyarakat Temanggung secara adil dan setara.

Urusan PKK dan GOW : Pemberdayaan Perempuan sampai Tingkat Desa

Sebagai organisasi perempuan, yang kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Temanggung mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan gender di Kabupaten Temanggung. Karena pada dasarnya yang menjadi kader PKK dan anggota dari GOW yang juga tersebar hingga ke desa-desa. Dengan adanya kader PKK di desa diharapkan penyampaian informasi tentang pembangunan kesejahteraan keluarga dapat cepat tersampaikan ke masyarakat desa. Dengan adanya GOW juga merupakan sebuah langkah untuk mempersatukan dan menggabungkan beberapa organisasi wanita yang ada di Temanggung.

Urusan yang menjadi program kerja dari PKK maupun GOW adalah mencakup kesejahteraan keluarga secara umum dan kesejahteraan perempuan secara khusus, sehingga dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dibagi menjadi 4 Pokja, yang mana tiap Pokja memiliki kader yang berada di Desa sehingga penyampaian materi, informasi, dan program akan tersampaikan dengan cepat dan dalam pelaksanaannya juga lebih efisien. Dengan begitu, maka semua program dan kegiatan yang dilaksanakan GOW dan PKK adalah sudah merespon gender secara keseluruhan.

Urusan Perhubungan : Belum Ada Program Spesifik Gender

Urusan perhubungan ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku salah satu unsur otonomi daerah, yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan sub bidang perhubungan darat. Jadi disini kewenangan dari Dinas Perhubungan adalah terkait dengan urusan perhubungan darat, yang mencakup transportasi umum, sarana dan prasarana transportasi, seperti; terminal, halte, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain. Dalam anggarannya pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sama sekali tidak menyebutkan satu program pun untuk mengakomodir kebutuhan gender, padahal dapat kita ketahui bahwa pengguna sarana dan prasarana transportasi umum adalah masyarakat umum, yang tentunya berasal dari kaum perempuan dan laki-laki.

Meski tidak ada program kegiatan yang merespon isu gender, tetapi dari Dinas Perhubungan menyatakan bahwa tengah melaksanakan Peningkatan dan perkembangan infrastruktur untuk transportasi umum ini tentunya akan mengarah kepada pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang dari Dinas Perhubungan juga menyadari bahwa pelayanan yang harus diberikan adalah adil dan setara untuk semua masyarakat Temanggung yang menggunakan sarana transportasi umum.

Meski dalam tahun 2016 tidak ada program kegiatan yang menyentuh gender, namun di tahun 2017/2018 Dinas Perhubungan telah melaksanakan program Zoss yang mana Zoss merupakan Zona Selamat Sekolah yang digagas oleh Kementerian Perhubungan demi keamanan dan kenyamanan siswa sekolah dalam menyeberang jalan. Selain itu juga ada rencana untuk mengubah denah terminal dengan *prototype* baru yang lebih modern dan lebih responsif gender.

Urusan Penanggulangan Bencana : Kuota Pelibatan Perempuan

Dalam pelaksanaan program kegiatannya, BPBD sebisa mungkin untuk melibatkan setidaknya 30% perempuan untuk ikut serta didalamnya, semisal BPBD melaksanakan program simulasi bencana, maka setidaknya ada 30% perempuan, anak-anak, dan lansia yang ikut dalam kegiatan tersebut. Selain dengan kegiatan dan program, BPBD juga sangat erat dengan pengelolaan pengungsi yang dikarenakan bencana alam, hal ini juga telah menjadi perhatian untuk BPBD dimana, BPBD telah merancang semua kebutuhan baik itu logistik, tenda, dapur umum, toilet, dan persediaan kebutuhan dasar yang terbagi secara adil bagi perempuan dan laki-laki, dari anak-anak hingga lansia.

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, BBRISBG, Pemadam Kebakaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur, sehingga dengan adanya kesiapsiagaan tersebut dapat menekan jumlah risiko yang akan didapatkan.

Penutup Simpulan

Berdasarkan temuan dalam wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan di beberapa SKPD atau Dinas terkait, di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan hasil observasi dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Temanggung dan hasil penelitian di beberapa dokumen pemerintah tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Temanggung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa :

PPRG di Kabupaten Temanggung belum terlaksana dengan optimal hingga tahun anggaran 2016, karena berdasarkan data yang diperoleh dalam LRA APBD Kabupaten Temanggung, belum semua SKPD mampu menyusun PPRG dan ARG. Dalam LRA APBD Kabupaten Temanggung tahun 2016, hanya ada beberapa SKPD yang telah menerapkan PPRG. Adalah SKPD atau Badan berikut yang telah melaksanakan PPRG :

- Dinas Pendidikan,
- Dinas Kesehatan,
- Dinas Sosial,
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
- Badan KBPPP Kabupaten Temanggung.

Meski hanya dengan 6 (enam) SKPD yang menerapkan PPRG, namun pelaksanaan program dan kegiatan yang merespon gender, yang ditugaskan pada 6 (enam) SKPD tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan, dengan pernyataan beberapa informan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada 6 (enam) SKPD tersebut (yang merespon gender) dapat berjalan optimal. Serta pelaksanaan PPRG dan ARG juga dibantu oleh PKK dan GOW, selaku dua organisasi yang menjadi *focal point* untuk pelaksanaan PUG (PPRG dan ARG) di daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran yang diharapkan mampu dijadikan masukan dan kontribusi terhadap kemajuan perkembangan PUG yang terlaksana melalui PPRG yang tersalurkan melalui ARG di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berikut saran yang penulis berikan.

Pelaksanaan PUG yang terwujudkan melalui PPRG yang berbuah ARG merupakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan manfaat yang sama bagi

masyarakat baik itu perempuan atau laki-laki melalui program dan kegiatan yang merespon gender. Namun pelaksanaannya di daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Temanggung masih belum terlaksana dengan optimal, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Temanggung membangun komitmen yang kuat diantara para jajaran SKPD yang ada. Komitmen ini adalah berlandaskan kepada UUD 1945, UU, PP, Inpres/Kepres yang mengatur PUG. Dengan demikian bila komitmen telah terjalin dalam komponen SKPD, baik itu dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maka kepemimpinan yang ada akan lebih condong ke arah pembangunan gender, melalui pelaksanaan PUG (PPRG dan ARG) di Kabupaten Temanggung.

Untuk pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, selaku pelaksana otonomi daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan pelaksanaan PUG, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mampu menyusun kebijakan daerah, baik itu Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang PUG baik dari PPRG hingga ARG. Hal ini dilakukan adalah dalam rangka perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Pendekatan Kinerja*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ashari, Luthfi. (2004). *Dinamika Pemerintahan Kabupaten : Forum, Perencanaan Anggaran dan Tranparansi Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan dan Poso*. Jakarta : Bank Dunia.
- Aisyah, Nur. (2013). *Jurnal: Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)* : Muwazah.
- Puspitawati, Herien. (Maret 2012). *Makalah: Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan, dan Keadilan Gender*. Bogor: FEMA, IPB.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016.
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Kementerian/Lembaga, tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.